



Reduksi Kemiskinan dengan Mengoptimalkan Digitalisasi Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara

✉ Ilyas¹, Tajuddin², Syamsir Nur³, Caesar Muslim⁴, Isalman⁵

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

⁵Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo.
Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232, Indonesia.

Received: October 25, 2022; Published: February 28, 2023

ABSTRACT

This study aims to determine the steps taken to reduce poverty through optimizing the digital-based maritime economy. This research method uses a quantitative approach. The data used is secondary data. Data analysis was done by descriptive analysis. The results of this study indicate that there are several steps taken by the Southeast Sulawesi Government to encourage the optimization of digitalization in the maritime sector including building synergy and collaboration between local governments and relevant ministries; development of social media and film-based tourism; optimizing the role of local governments; providing quality human resources in the digital field and increasing digital infrastructure development.

Keywords: Digitalization, maritime, poverty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan untuk mereduksi kemiskinan melalui pengoptimalan ekonomi maritim berbasis digital. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakuk dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Tenggara untuk mendorong optimalisasi digitalisasi disektor maritim diantaranya: membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait; pengembangan pariwisata berbasis media sosial dan film; optimalisasi peran pemerintah daerah; penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang digital serta peningkatan pembangunan infrastruktur digital.

Kata kunci: Digitalisasi, maritim, kemiskinan.

How to cite:

Ilyas, Tajuddin, Nur, S., Muslim, C., & Isalman (2023). Reduksi Kemiskinan dengan Mengoptimalkan Digitalisasi Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal of Economics Development Issues*, 6(1), 18-24. <https://doi.org/10.33005/jedi.v6i1.153>.



PENDAHULUAN

Sektor kemaritiman dan kelautan menjadi fokus utama menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sejak dimulainya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) pada 2014. Semangat membangun sektor maritim dan kelautan yang diusung oleh pemerintahan ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejak saat itulah konsep kemaritiman dan kelautan sering dikumandangkan dan menjadi bahan perbincangan dan diskusi di seluruh lapisan masyarakat (Hirawan & Abadi, 2020).

Fakta paradigma pembangunan dengan adanya ketimpangan pembangunan di sektor laut dan daratan serta keterpurukan ekonomi, di era Presiden Joko Widodo, tercerahkan kembali untuk kembali menata laut demi kemakmuran bangsa. Presiden Joko Widodo mengusung tema kemaritiman dengan “Poros Maritim Dunia” dan “Tol Laut”. Memang sudah seharusnya, bangsa Indonesia untuk menata dan membangun laut khususnya kemaritiman menjadi modal pembangunan menuju kemakmuran bangsa (Kadar, 2015).

Paradigma pembangunan ekonomi maritim adalah sesuatu yang sangat ideal. Mengingat potensi sektor maritim Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara sangat besar. Selain itu berbagai problem pembangunan ekonomi selama ini banyak dialami oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan kelangsungan hidupnya dari hasil laut. Fakta ini dapat dikonfirmasi dari sumbangan sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang menyumbang 24,94 persen pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara (BPS, 2022). Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, bahkan sembilan dari 17 kabupaten/kota yang ada adalah daerah kepulauan. Karena itu, paradigma pembangunan ekonomi maritim tentu memberi harapan bagi provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan pada triwulan kedua tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 sebesar 5,07 persen. Bahkan sebelum pandemi Covid 19, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara selalu berada pada angka 6 persen. Sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan di angka 5 persen.

Capaian positif pertumbuhan ekonomi tersebut linear dengan perbaikan indikator sosial-ekonomi lainnya. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus merangkak naik, meski peningkatannya masih lambat, angka kemiskinan yang juga terus mengalami penurunan. Namun demikian, jika data kemiskinan tersebut dicermati akan terlihat bahwa masih ada sisi gelap dari kemiskinan tersebut. Dimana angkanya masih dua digit. Lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Sebagaimana publikasi BPS tahun 2022, Kemiskinan di Sulawesi Tenggara pada bulan September tahun 2021 adalah sebesar 323.260 jiwa atau 11,74 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2020, jumlahnya sebanyak 317.320 jiwa atau 11,69 persen.

Dibanding kemiskinan perkotaan, kemiskinan perdesaan masih begitu tinggi. Jumlahnya sebesar 252.250 jiwa atau 14,34 persen. Sementara itu kemiskinan di perkotaan jumlahnya sebesar 71.020 jiwa atau 7,14 persen. Tenaga kerja di perdesaan yang dominan bekerja sebagai petani dan nelayan adalah penyumbang terbesar kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu untuk mereduksi kemiskinan di Sulawesi Tenggara maka perlu memperbaiki pendapatan para petani maupun nelayan tersebut.

Fenomena ini memberi sinyal bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang bahkan di atas 5 persen belum mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan. Masih sangat dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif untuk mereduksi kemiskinan secara signifikan. Dari sinilah pentingnya optimalisasi digitalisasi dalam pembangunan ekonomi. Begitu banyak fakta empiris yang menunjukkan bagaimana digitalisasi ekonomi berhasil menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Isife dkk, (2003) pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) berperan dalam pengentasan kemiskinan petani pedesaan di Abia State, Nigeria. Revolusi industri 4.0 memberi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Schwab, 2019).

KAJIAN LITERATUR

Revolusi industri 4.0 dibangun di atas revolusi digital. Revolusi ini ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang, termasuk big data, robotik, kecerdasan buatan (artificial intelegent), nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, Internet of Things (IOT), pencetakan 3D dan kendaraan otonom (Savitri, 2019).

Digitalisasi atau biasa juga dikenal dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penggunaan teknologi modern membantu penangkapn, pemrosesan, penyimpanan dan pengambilan dan komunikasi informasi baik dalam bentuk data numerik, teks, suara, atau gambar (Rahman, dkk., 2013). Menurut Greenidge (2003) dalam perkembangannya TIK dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat teknologi informasi seperti komputer pribadi, dengan teknologi komunikasi seperti telepon dan jringn telekomunikasi. Dalam perkembangannya TIK telah mengambildimensi yang lebih luas yang meliputi banyak media seperti telepon, televisi, radio, video, teleks, sistem informasi suara, faks, komputer pribad, dan internet (Adenyi, 2010 dalam Rahman 2013).

Kata maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi, maritime atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah maritime power yaitu negara maritim atau negara samudera. Maritim, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berkenaan dengan laut berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Dalam bahasa Inggris, kata maritime untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut (Kadar, 2015).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (2019), ekonomi maritim didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan dan luar kawasan perairan yang memanfaatkan sumber daya alam (UU No. 6 Tahun 1996) dan lingkungan yang berasal dari perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (UU No. 27 Tahun 2007). Jika ditelaah lebih dalam, sektor ekonomi maritim Indonesia meliputi 11 subsektor, diantaranya perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan, industri bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), pariwisata bahari, perhubungan laut, kehutanan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, jasa maritim, dan sumber daya alam (SDA) nonkonvensional (Hirawan & Abadi, 2020).

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau –berpenghuni maupun tidak berpenghuni- luas perairan laut yang mencapai 5,9 juta km², dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Wilayah Indonesia juga terletak pada posisi silang dunia, yaitu diantara dua benua dan dua samudera. Kelebihan ini membuat Indonesia memiliki SDA kelautan yang sangat besar dan posisi geografis yang sangat strategis bagi lalu lintas pelayaran internasional (Susilo, 2018).

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2021, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 31,01 persen. Dengan posisi seperti ini sektor maritim memegang peran vital dalam pembangunan di Sulawesi Tenggara.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data berasal dari publikasi BPS, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan dan kelautan Sulawesi Tenggara serta publikasi dari lembaga lain yang relevan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Proses analisis data meliputi pengumpulan dan tabulasi data, reduksi data dan interpretasi atau deskripsi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemaritiman yang berdasarkan pada terminologi adalah mencakup ruang dan wilayah permukaan laut, pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat berbagai kegiatan seperti pariwisata, lalu lintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan (Kadar, 2015).

Laut beserta sumber daya alamnya, bagi bangsa Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup keseharian. Tidak saja penting secara politik dengan menyatukan gugusan pulau-pulau yang tersebar namun juga memberi manfaat ekonomi, sosial serta pengetahuan (Nurhayati & Putra, 2019). Demikian halnya dengan keberadaan laut bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Laut telah menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut SUTAS BPS 2018, jumlah petani yang belum menggunakan internet di Sulawesi Tenggara adalah 315.566 jiwa atau sebesar 85,64 persen. Sementara yang sudah menggunakan internet adalah sebesar 52.928 jiwa (14,36 persen). Tingginya angka petani termasuk nelayan yang belum menggunakan internet menjadi tantangan besar yang dihadapi untuk pengembangan pertanian berbasis digitalisasi. Karena bagaimana mungkin bisa sukses untuk digitalisasi kalau penggunaan internet masih rendah. Digitalisasi merupakan kunci sukses industri atau ekonomi masa depan (Ross, 2019). Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk pengembangan sektor maritim berbasis teknologi yaitu:

Pertama, membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait seperti kementerian perikanan dan Kelautan (KKP) ataupun Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Langkah ini terlihat dari dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi perikanan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya komoditas perikanan budidaya. Salah satu komoditas yang akan ditingkatkan produktivitasnya saat ini adalah udang. Alasan memilih udang karena merupakan komoditas perikanan yang paling banyak diserap oleh pasar internasional setelah salmon. Penyerapannya bisa lebih dari 3 juta ton per tahun (KKP, 2021).

Peningkatan produktivitas udang – baik udang tangkap maupun budidaya - adalah sesuatu yang sangat berdasar. Mengingat salah satu komoditas unggulan ekspor Sulawesi Tenggara adalah udang. Menurut publikasi BPS 2022, produksi udang di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 sebanyak 2.144 ton dengan nilai Rp.94,914 miliar. Selain udang komoditas perikanan tangkap unggulan Sulawesi Tenggara adalah rumput laut, teripang, ikan cakalang, tongkol, kerapu, dan tuna. Pengembangan komoditi perikanan harus fokus dan memprioritaskan pada komoditi yang memiliki keunggulan komparatif sekaligus memiliki permintaan ekspor yang tinggi dengan pasar yang jelas. Kebijakan ini selain bisa mengurangi kerugian karena terlalu banyak komoditi yang ingin dikembangkan juga untuk menjamin pasar, agar pasokan produksi tetap terjamin atau akan tetap laku di pasaran.

Salah satu kendala pengelolaan sektor perikanan selama ini adalah pengelolaannya yang masih bersifat tradisional. Hasilnya pun menjadi tidak optimal. Karena itu, saat ini pengembangan komoditi perikanan haruslah ditopang dengan pemanfaatan teknologi atau digitalisasi. Mulai dari sektor hulu sampai hilir. Baik untuk perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.

Tadesse dan Bahigwa (2015) dalam (Rahman, 2018) menemukan bahwa pemanfaatan telepon mobile dalam pembuatan keputusan pemasaran petani di Ethiopia. Mereka menyatakan bahwa akses terhadap informasi merupakan input penting untuk membuat keputusan pertanian dalam produksi, pemasaran dan keuangan di Afrika Selatan Sahara. Kisah sukses petani di Ethiopia ini bisa direplikasi di Sulawesi Tenggara. Bagaimana memanfaatkan telepon mobile dalam aktifitas nelayan dari proses produksi, layanan keuangan serta pemasaran produk. Akses pasar yang jelas, dengan informasi yang akurat dan selalu terupdate yang tersedia di telepon mobile sangat membantu nelayan. Dengan pemanfaatan telepon mobile maka produksi akan selalu disesuaikan dengan permintaan pasar sehingga tidak akan ditemukan lagi produksi nelayan yang tidak laku karena ketiadaan pasar yang bisa mengakomodir.

Kedua, Pengembangan pariwisata berbasis media sosial dan film. Tempat wisata baru di Indonesia yang diluncurkan pemerintah dengan sebutan “Bali baru” mulai dipromosikan secara massif oleh Kementerian Pariwisata dan lembaga terkait. 10 Bali baru meliputi Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bomo, Wakatobi, Labuan Bajo dan Morotai (Hirawan & Abadi, 2020). Masuknya Wakatobi sebagai salah satu dari 10 obyek wisata yang menjadi fokus pengembangan pariwisata, menjadi kabar gembira bagi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Hal ini karena sektor pariwisata mampu menjadi katalis peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain Wakatobi, Sulawesi Tenggara masih memiliki banyak objek wisata pantai lainnya yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Misalnya Pulau Bokori, Labengki, Pantai Kalomang, Tamborasi dan

lainnya. Pengembangan pariwisata yang fokus dan bertahap adalah langkah yang sangat tepat, karena ada keterbatasan fiskal pemerintah.

Semakin meningkatnya pemanfaatan media sosial saat ini, bisa dijadikan sebagai medium promosi pariwisata. Keindahan objek wisata yang ada di Sulawesi Tenggara bisa dieksplor lebih jauh dengan medium postingan-postingan di berbagai media sosial. Promosi itu bisa berupa cerita atau story, gambar, ataupun video. Disini dibutuhkan peran vital dari pemerintah daerah untuk menggaet dan mengoptimalkan generasi muda untuk pro aktif dalam upaya promosi pariwisata. Dukungan kepada para youtuber, selebgram atau content creator lokal sangat penting. Mereka inilah ujung tombak promosi pariwisata yang ada di daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah pun bisa bekerja sama dengan sineas, sutradara film nasional untuk menjadikan objek wisata yang ada di Sulawesi Tenggara sebagai lokasi syuting pembuatan film. Medium film dalam promosi pariwisata sangat besar pengaruhnya. Ini karena film mampu menciptakan favourable image dari lokasi yang ditampilkan sehingga mengundang masyarakat untuk datang ke lokasi tersebut. Fenomena ini memberikan efek positif pada pariwisata dengan peningkatan kunjungan wisata (Anggita, 2020).

Ketiga, optimalisasi peran pemerintah daerah. Terkait peran pemerintah, perlu ditunjuk dinas atau badan yang bertanggung jawab dalam menangani proses digitalisasi sektor maritim di Sulawesi Tenggara. Misalnya saja program ini dibawah kendali Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian. Pekerjaan utama dinas ini adalah mengembangkan aplikasi untuk layanan berbasis online. Penunjukan satu dinas yang khusus melayani proses pengembangan layanan berbasis aplikasi digital tentunya untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan, disamping itu koordinasi dan komando kerja akan lebih mudah dan jelas jika ada satu badan atau lembaga tertentu yang ditunjuk sebagai kordinator.

Peran pemerintah yang lain adalah penyediaan anggaran. Sebagus apapun sebuah program jika tidak ditunjang oleh dana yang memadai, maka keberhasilan program tersebut hanya akan menjadi impian semata. Disinilah urgensi peran pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk merealisasikan program pembuatan aplikasi layanan sektor maritim berbasis online/digital.

Keempat, keberhasilan digitalisasi layanan sektor maritim berbasis digital sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu perlu upaya serius dan berkesinambungan untuk mencetak SDM di bidang digital. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan misalnya fokus ada peningkatan pelajaran informatika di sekolah, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk itu pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk memberikan beasiswa pelatihan dan pendidikan kepada pengajar pelajaran ini. Beasiswa ini dapat pula diprioritaskan untuk pelajar yang memiliki minat dan kemampuan digital yang bagus. Programnya bisa dalam bentuk digital talent scholarship. Program ini tentu sangat prospektif. Mengingat saat ini dan di masa depan pekerjaan utama yang akan tetap eksis adalah pekerjaan di bidang digital.

Pemberian beasiswa ini juga sangat bermanfaat bagi daerah Sulawesi Tenggara, karena ke depan akan semakin banyak warga yang memiliki kemampuan digital. Sehingga SDM digital tidak perlu disuplay dari daerah lain. Intinya akan menciptakan kemandirian tenaga kerja. Selain itu, pemerintah daerah bisa memanfaatkan Badan Latihan Kerja (BLK) yang ada untuk memberikan pelatihan langsung mengenai berbagai ilmu aplikatif pada sektor digital dan teknologi seperti pembuatan aplikasi, pemograman, dan penggunaan bahasa komputer.

Kelima, peningkatan pembangunan infrastruktur digital. Perlu adanya peningkatan kinerja terhadap pembangunan fasilitas dan infrastruktur digital. Problem infrastruktur digital adalah salah satu kendala besar di Sulawesi Tenggara, mengingat bentuk wilayahnya yang berupa kepulauan. Karena itu perlu melakukan identifikasi daerah-daerah yang kualitas jaringan internetnya masih buruk perlu dilakukan. Hal ini tidak sulit dilakukan. Kerjasama dengan penyedia, pengelola atau operator seluler perlu diintensifkan. Setelah data daerah yang kualitas internetnya masih buruk telah tersedia, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pembangunan infrastruktur digital di daerah tersebut.

Secara ekonomi, yang seringkali menjadi alasan swasta dalam hal ini penyedia atau operator seluler tidak membangun infrastruktur digital di suatu daerah karena hitung-hitungan ekonomi sangat tidak menguntungkan. Contohnya karena di daerah tersebut jumlah masyarakatnya hanya sedikit, karenanya daerah tersebut sangat tidak layak untuk ditempati berinvestasi. Hal yang mudah dipahami karena logika investasi memang dibangun dengan profit oriented.

Di sinilah perlunya kehadiran negara ataupun pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Yang biasa dikenal dengan kegagalan pasar. Sebagaimana mafhum dipahami bahwa logika pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah berbasis pada *Public Service Obligation* (PSO). Artinya pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada publik. Logikanya bukan *profit oriented* seperti sektor swasta. Tetapi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Dengan kapasitas yang dimiliki pemerintah bisa mendorong pihak swasta untuk membangun infrastruktur digital di daerah yang tidak layak investasi dengan memberikan intensif atau kemudahan-kemudahan pengembangan usaha mereka. Dengan adanya langkah ini diharapkan ke depan tak ada lagi daerah di Sulawesi Tenggara yang tidak terjangkau layanan internet. Dan muara paling akhirnya Sulawesi Tenggara bisa optimis mereduksi kemiskinan.

SIMPULAN

Sebagai provinsi yang memiliki lautan yang luas, Sulawesi Tenggara memiliki potens yang sangat besar untuk berkembang. Namun fakta menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara tergolong masing tinggi, angkanya masih doble digit. Kemiskinan perdesaan lebih tinggi dibanding kemiskinan perkotaan. Penduduk perdesaan yang dominan bekerja sebagai petani ataupun nelayan menjadi penyumbang terbesar kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Upaya yang dapat dilakukan untuk mereduksi kemiskinan adalah pengoptimalan digitalisasi sektor maritim. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Tenggara untuk mendorong optimalisasi digitalisasi disektor maritim diantaranya: membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait; pengembangan pariwisata berbasis media sosial dan film; optimalisasi peran pemerintah daerah; penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang digital serta peningkatan pembangunan infrastruktur digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, R.S. (2020). Daya Tarik Film Terhadap Pariwisata. Dalam A.E. Yustika dkk (Ed.) *Menjemput Musim Transformasi dan Reformasi Ekonomi 2019-2024*. Malang: Intrans Publishing.
- BPS Sulawesi Tenggara. (2022). *Indikator Statistik Terkini Provinsi Sulawesi Tenggara*. Kendari: BPS Sulawesi Tenggara.
- Hirawan, F.B, & Abadi H.A. (2020). Sektor Maritim Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia, dalam A.E. Yustika dkk (Ed.) *Menjemput Musim Transformasi dan Reformasi Ekonomi 2019-2024*. Malang: Intrans Publishing.
- Isife, B.I., Nnodim, A., & Albert, C. (2013). The role of ict in poverty alleviation among rural farmers in Abia State. *Computer Engineering and Intelligent Systems, Vol. 4, No. 7*, 20–25.
- Kadar, A. (2015). Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Keamanan Nasional Vol. I, No. 3*, 427-442.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. (2019) *Kemenko Maritim Terus Mendorong Ekonomi Kemaritiman Demi Mengangkat Kesejahteraan Masyarakat di Seluruh Wilayah Indonesia*. <https://maritim.go.id/kemenko-kemaritiman-terus-mendorong-ekonomi-kemaritiman-demi/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *KKP Siap Gali Potensi Kelautan dan Perikanan Sultra*. <https://kkp.go.id/artikel/31232-kkp-siap-gali-potensi-kelautan-dan-perikanan-sultra>
- Nurhayati, Ema & Putra, R.A.D. (2019). Penerapan Maritime Domain Awareness sebagai Langkah Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Provinsi Bali. *Prosiding Seminar Nasional Bagian II Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. hal. 105-128.
- Rahman, A., et al (2013). Impact on socio-economic condition of rural Bangladesh. *Journal of World Economic Research, Vol. 2, No. 1*, p. 1-8.
- Ross, Alec. (2018). *Industri-Industri Masa Depan*. Jakarta: Renebook.

- Savitri, Astrid. (2019). *Revolusi Industri 4.0; Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Di Era Disrupsi 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Genesis.
- Schwab, Klaus. (2019). *Revolusi Industri Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Susilo, I.B. (2018). *Kemaritiman Indonesia: Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.